

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH DI PROVINSI JAMBI

FACTORS AFFECTING LAND TENURE INEQUALITY IN JAMBI PROVINCE

Nopa Linda*, Indrawari, Syafruddin Karimi

Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas

*Penulis korespondensi : nopalinda2012@gmail.com

ABSTRACT

Inequality in land tenure is one of the problems faced by the agricultural sector in Jambi Province. This can lead to the low welfare of farmers. Therefore this study aims to analyze the factors that influence land tenure in each sub-district in Jambi Province in 2004 and 2014. The data used is secondary data from the results of the Farmers Revenue survey conducted by BPS with 8407 agricultural households in 69 sub-districts in 2004 and 9968 agricultural households in 127 sub-districts in 2014. The analysis tool used was multiple regression analysis. The results of this study explain that the 2004 regression model cannot be analyzed because the value of the F model test is > 0.05 . Meanwhile for 2014, there were three independent variables that influence the inequality of farmer income, the number of people working in the agricultural sector and the number of non-agricultural workers with a significance level of 0.001 and the coefficient value of each independent variable is 0.54, (-0,00082) and (-0.0032) while the simultaneous effect of this independent variable is 39,58 percent.

Keywords: Land Mastery Inequality, Income Inequality, Agricultural Household

ABSTRAK

Ketimpangan penguasaan tanah merupakan salah satu masalah yang dihadapi sektor pertanian di Provinsi Jambi. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kesejahteraan petani. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan penguasaan tanah di tiap kecamatan dalam Provinsi Jambi pada Tahun 2004 dan Tahun 2014. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder dari hasil survei Pendapatan Petani yang dilakukan BPS dengan jumlah responden sebanyak 8407 rumah tangga pertanian pada 69 kecamatan pada tahun 2004 dan 9968 rumah tangga pertanian pada 127 kecamatan pada tahun 2014. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa model regresi tahun 2004 tidak bisa di analisis karena nilai dari uji F model $> 0,05$. Sementara itu untuk tahun 2014, terdapat tiga variabel bebas yang berpengaruh yaitu ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh non pertanian dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan nilai koefisien dari masing-masing variabel bebas adalah 0,54, (-0,00082) dan (-0,0032) sedangkan pengaruh serentak dari variabel bebas ini adalah 39,58 persen.

Kata Kunci: Ketimpangan Penguasaan Tanah, Ketimpangan Pendapatan, Rumah Tangga Pertanian

PENDAHULUAN

Salah satu masalah fundamental yang dihadapi sektor pertanian adalah masalah sumber daya tanah. Masalah ini berupa ketimpangan distribusi penguasaan tanah, kelangkaan dan tingginya biaya pengolahan tanah (Kuncoro 2010). Selanjutnya fakta tentang tanah di Indonesia dapat dilihat dari hasil Sensus Pertanian 2013, tercatat sekitar 55 persen rumah tangga pertanian memiliki tanah kurang dari 0.5 Ha. Keadaan penguasaan tanah sejumlah tersebut tentunya sangat sukar untuk mendukung kesejahteraan petani. Sedangkan fakta tentang ketimpangan penguasaan tanah dijelaskan Karimi (2014) bahwa gini ratio penguasaan tanah pertanian di Indonesia dari tahun 1973 hingga tahun 2013 berada diatas angka 0,5. Sementara itu *Institute for Development of Economis and Finance* (INDEF) justru mendapatkan angka gini ratio penguasaan tanah pertanian yang lebih tinggi. Dengan menggunakan data sensus pertanian tahun 2013 INDEF mencatat bahwa secara global di Indonesia angka gini rasio penguasaan tanah pertanian mencapai 0,64. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia berada pada tingkat yang parah.

Sementara itu provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang masih mengandalkan sektor pertanian terutama perkebunan sebagai sektor yang paling besar kontribusinya dalam PDRB. Terdapat asumsi bahwa penguasaan tanah sektor perkebunan dinilai ekonomis jika diusahakan dalam skala besar atau minimal 2 Ha. Tentunya hanya petani dengan modal besar yang mampu mengelolanya sementara itu petani kecil umumnya sebagai pekerja pada petani tersebut. Kondisi demikian diduga ikut memperparah ketimpangan penguasaan tanah. Berdasarkan fenomena ini maka perlu diadakan kajian mendalam tentang bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan petani, ketimpangan penguasaan tanah, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh nonpertanian Provinsi Jambi tahun 2004 dan tahun 2014 serta faktor-faktor penyebab ketimpangan penguasaan tanah di provinsi jambi.

KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

Tanah merupakan bagian dari Sumber daya dan faktor ekonomi yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini karena ketersediaan tanah merupakan salah satu faktor produksi utama yang menentukan tingkat produktivitas pertanian. Sementara itu menurut Todaro dan Smith (2003) salah satu masalah pokok yang dihadapi pertanian di Asia adalah terkonsentrasinya tanah pada petani dengan modal besar dan petani dengan kepemilikan lahan yang sempit yang tidak mampu memberikan kesejahteraan. Kondisi tersebut menjadi penyebab anjloknya tingkat produksi dan menjadi salah satu penyebab inefisiensi dalam pertanian. Hal ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan kemiskinan.

Beberapa ahli mengemukakan faktor yang mempengaruhi penguasaan tanah diantaranya adalah Barlowe (1986) yang menyatakan perkembangan teknologi, tingkat pendidikan, proporsi pendapatan usaha tani terhadap penerimaan rumah tangga, usia, faktor alam, jumlah tabungan dan dukungan pemerintah. Selanjutnya Soekartawi (1986) menambahkan pengalaman bertani, jumlah tanggungan keluarga dan harga jual panen. Lebih lanjut Suhendar (1995) menjelaskan bahwa pendapatan rumah tangga petani diduga menjadi penyebab ketimpangan penguasaan tanah karena petani dengan modal yang besar lebih mampu memperbesar produksinya dengan cara membeli atau menyewa tanah. Sementara itu dewasa ini sebagian besar generasi muda tidak tertarik untuk bekerja di sektor pertanian. Hal ini juga menyebabkan ketimpangan penguasaan tanah meningkat (Xie & Lu, 2017).

Meskipun sektor pertanian sebagai salah satu sektor terbesar yang menampung tenaga kerja namun sektor ini belum mampu memberikan kesejahteraan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya produktifitas di sektor pertanian yang di akibatkan oleh ketersediaan tanah yang semakin langka. Menurut (Himpuni, 2014) beberapa faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di sektor pertanian adalah permintaan jenis tenaga kerja di sektor pertanian, pembangunan di sektor pertanian, tingkat upah, produktivitas dan luas tanah pertanian

Berdasarkan penjelasan diatas maka dibentuklah model penelitian sebagai berikut:

$$Gini_land = f \{Gini_Inc, Entrepreneur_Agrc, Labour_nonAgrc\} \dots (3.1)$$

Persamaan linier model regresi berganda (OLS) dapat dirumuskan dalam model berikut:

$$Gini_Land = \beta_0 + \beta_1 Gini_INC + \beta_2 Entrepreneur_Agrc + \beta_3 Labor_nonAgrc + \varepsilon \dots (3.2)$$

atau

$$I = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon.$$

dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Variabel Terikat/Dependen (*I*)

I : Indeks gini ratio ketimpangan penguasaan tanah pertanian

b. Variabel Bebas / Independen

*X*₁ : Indeks gini ratio ketimpangan pendapatan petani

*X*₂ : Jumlah yang berusaha di sektor pertanian

*X*₃ : Jumlah buruh di sektor nonpertanian

β_0 : Konstanta / *Intercept*

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

ε : Kesalahan pengganggu (variabel lain di luar model)

Sebelum pembentukan model maka dicari koefisien gini ratio penguasaan tanah dan koefisien gini pendapatan petani. Secara ringkas formulasinya sebagai berikut:

$$G = I + \frac{1}{n} - 2/n^2 Y_r [\sum_{i=1}^n Y_i]$$

Keterangan :

G = Indeks Gini

Nilai G berada pada selang 0 dan 1, dengan kategori sebagai berikut:

- kategori ketimpangan berat apabila $G > 0,5$
- kategori ketimpangan sedang apabila $0,4 < G < 0,5$
- kategori ketimpangan ringan apabila $G < 0,4$.

n = jumlah rumah tangga contoh.

*Y*_{*i*} = Total luas tanah yang dikuasai oleh rumah tangga petani ke *i* atau total tingkat pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga petani ke *i*.

*Y*_{*r*} = rata-rata luas tanah yang dikuasai rumah tangga petani atau rata-rata pendapatan petani yang diperoleh.

Setelah ditemukan model terbaik selanjutnya model ini dilakukan uji asumsi klasik dan uji signifikansi parameter dari variabel bebas.

Penelitian ini menggunakan data BPS dari Survei Pendapatan Petani dengan jumlah sampel 9.968 rumah tangga pada 127 kecamatan tahun 2014 dan 8.407 rumah tangga pada 69 kecamatan tahun 2004. Data yang tersedia selanjutnya diolah dengan menggunakan aplikasi komputer yang telah banyak digunakan. Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Pendapatan serta Karakteristik Rumah Tangga Pertanian pada Provinsi Jambi Tahun 2004 dan Tahun 2014

Sekitar 59 persen dari keseluruhan kecamatan yang ada di Provinsi Jambi tahun 2004 dan 2014 mengalami kenaikan penguasaan tanah. Kenaikan paling besar terjadi pada lahan pertanian non sawah. Kenaikan penguasaan tanah ini paling besar terjadi pada tanah perkebunan (Tabel 1). Hal ini juga dibuktikan dengan persentase sumbangan sektor perkebunan terhadap PDRB yaitu sebesar 29,79 persen dan sektor perkebunan merupakan salah satu sektor utama dalam memberikan kontribusi PDRB Jambi. Sementara itu selama sepuluh tahun terakhir terjadi penurunan jumlah penguasaan lahan pertanian sawah sebesar 8,9 persen. Hal ini disebabkan oleh tingginya penggunaan lahan sawah yang digunakan untuk pemukiman dan aktivitas ekonomi di sektor nonpertanian.

Tabel 1. Nilai Minimum, Maximum, Jumlah dan Rata-rata Penguasaan Tanah (*000 Ha) serta Koefesien gini ratio per kecamatan pada Rumah Tangga Sampel Survei Pendapatan Petani di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004 dan Tahun 2014

Keterangan	2004					2014				
	N	Min*	Max*	Sum*	Mean*	N*	Min*	Max*	Sum*	Mean*
Luas Lahan sawah	65	,0014	1,56	17,19	0,26	86	,0100	1,43	15,66	0,18
Luas lahan pertanian nonsawah	69	,1271	4,76	115,27	1,67	126	,0700	5,07	266,96	2,12
Luas Lahan Nonpertanian	69	,0094	0,81	7,02	0,10	127	,0100	0,89	12,49	0,10
Total Luas Tanah yang Dikuasai	69	,2008	4,88	139,48	2,02	127	,1000	5,34	295,17	2,32
Koefesien Gini Ratio Penguasaan Tanah	69	,0300	0,74	-	0,41	127	,0100	0,76	-	0,44

Sumber: BPS (data diolah)

Sedangkan indeks gini penguasaan tanah pada tahun 2004 dan 2014 secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,03. Kondisi tingkat ketimpangan tanah pada provinsi jambi secara umum masih berada pada tingkat ketimpangan sedang. Walaupun demikian jika dilihat secara rinci maka terjadi penambahan jumlah kecamatan yang mengalami tingkat ketimpangan parah. Peningkatan kecamatan yang mengalami tingkat ketimpangan parah disebabkan oleh adanya perilaku para pemilik modal yang lebih cenderung menginvestasikan uang mereka dalam bentuk tanah karena dianggap lebih menguntungkan. Petani terdesak kebutuhan hidup sehingga rela menjual lahannya dengan asumsi mereka masih bisa hidup dari menjadi buruh atau bagi hasil pada sektor perkebunan. Hal ini dijelaskan oleh Jonida Bou Diba, et al (2018) bahwa 70 persen pendapatan rumah tangga petani tanpa lahan di Provinsi Jambi berasal dari anggota rumah tangga yang menjadi buruh sektor pertanian khususnya sektor perkebunan.

Sumbangan terbesar pendapatan rumah tangga pertanian di Provinsi Jambi tahun 2004 dan tahun 2014 berasal dari usaha sektor pertanian kemudian diikuti oleh usaha di luar sektor pertanian dan penerimaan dari upah buruh di luar sektor pertanian (Tabel 2). Sumber pendapatan dari menjadi buruh di luar sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami peningkatan

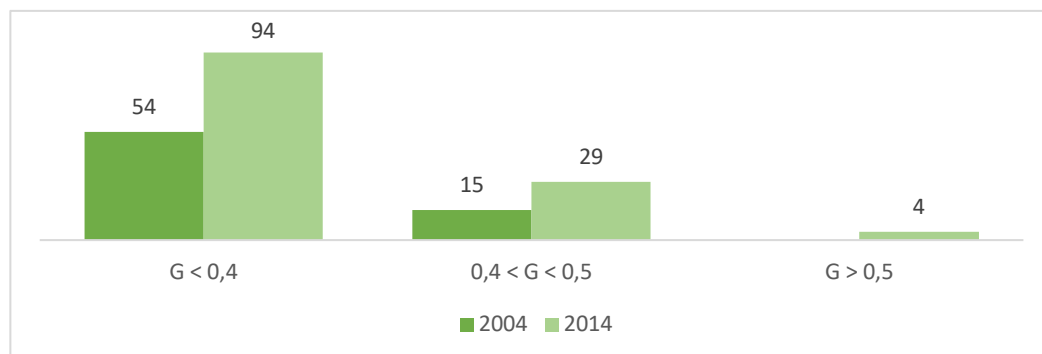
kontribusi selama periode sepuluh tahun. Hal ini menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah anggota rumah tangga pertanian yang bekerja sebagai buruh di sektor nonpertanian.

Tabel 2. Persentase Sumber Pendapatan terhadap Total Pendapatan Rumah Tangga Pertanian di Provinsi Jambi Tahun 2004 dan Tahun 2014

Sumber Pendapatan	2004 (%)	2014 (%)
Usaha sektor pertanian	61,53	61,16
Usaha di luar sektor pertanian	10,29	10,24
Pendapatan/penerimaan lainnya dan transfer	10,26	5,20
Upah/gaji buruh di sektor pertanian	8,84	8,15
Upah/gaji buruh di luar sektor pertanian	10,63	15,25

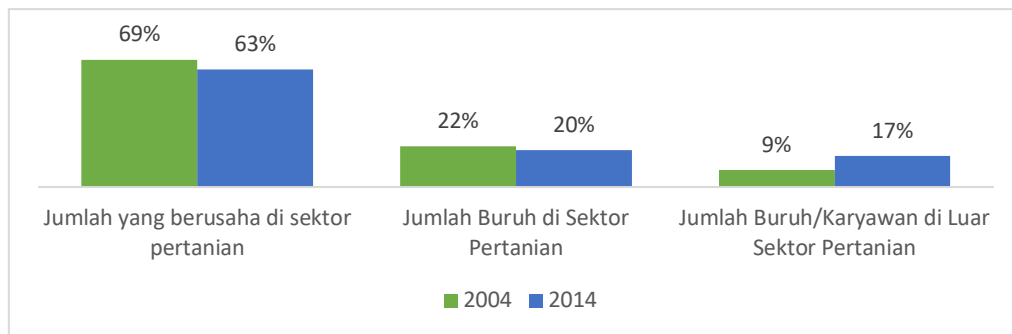
Sumber: Hasil Olah Data SPP 2004 dan 2014

Pada tahun 2004 angka gini ratio pendapatan maksimum berada pada angka 0,49 (Kecamatan Air Hangat Timur) dan angka gini ratio pendapatan minimum berada pada angka 0,14 (Kecamatan Rantau Pandan). Sedangkan pada tahun 2014 angka gini ratio pendapatan maksimum berada pada angka 0,61 (Kecamatan Bahar Utara) dan angka gini ratio pendapatan minimum berada pada angka 0,91 (Kecamatan Bahar Selatan). Sementara itu kondisi ketimpangan pendapatan pada rumah tangga pertanian secara umum berada pada tingkat rendah. Hal ini dapat dilihat dari persentase banyaknya jumlah kecamatan yang memiliki indeks gini ratio dibawah nilai 0,4 yaitu lebih dari 70 persen pada tahun 2004 dan 2014 (Gambar1).



Gambar 1. Pengelompokan Jumlah Kecamatan Berdasarkan Angka Gini Ratio Pendapatan di Provinsi Jambi Tahun 2004 dan Tahun 2014

Gambar 8 menjelaskan bahwa terjadi penurunan persentase yang berusaha di sektor pertanian sebesar 6 persen yaitu 69 persen tahun 2004 menjadi 63 persen tahun 2014. Penurunan persentase ini juga terjadi pada buruh di sektor pertanian yaitu sebesar 2 persen yaitu dari angka 22 persen pada tahun 2004 menjadi 20 persen pada tahun 2014. Sedangkan untuk buruh/karyawan di luar sektor pertanian terjadi hal yang sebaliknya yaitu terjadi kenaikan persentase sebesar 8 persen dari 9 persen pada tahun 2004 menjadi 17 persen pada tahun 2014.



Gambar 2. Persentase Jumlah Status Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi Tahun 2004 dan Tahun 2014

Tingkat pendidikan anggota rumah tangga pertanian yang berusaha dan yang menjadi buruh disektor pertanian masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya kepemilikan ijazah SD/setara yaitu diatas 35 persen baik pada tahun 2004 maupun 2014. Sedangkan untuk buruh di luar sektor pertanian terjadi perubahan yang signifikan yaitu ijazah tertinggi yang dimiliki didominasi oleh tamatan SMA/ sederajat yaitu sebesar 31,4 persen. Kondisi rendahnya tingkat pendidikan di sektor pertanian di Provinsi Jambi ini bisa diartikan sebagai rendahnya minat individu dalam rumah tangga pertanian dengan pendidikan tinggi untuk berkecimpung di sektor pertanian. Jika dilihat dari sisi gender pada tahun 2004 persentase yang berusaha dan jumlah pekerja di sektor pertanian serta pekerja non sektor pertanian didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2014 Kondisi ini tidak berubah justru mengalami kenaikan persentase yaitu diatas 70 persen. Dengan kata lain jumlah perempuan dalam rumah tangga pertanian yang berusaha dan menjadi buruh di sektor pertanian serta buruh di sektor nonpertanian mengalami penurunan. Sementara itu dari sisi usia yang berusaha dan buruh di sektor pertanian berada pada rentang usia 40 tahun ke atas yaitu sebesar 44 persen. Dengan kata lain anggota rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian didominasi oleh kaum tua. Sementara itu kaum muda yang berusia 20-39 tahun lebih banyak bekerja menjadi buruh di sektor nonpertanian dengan persentase lebih dari 58 persen. Hal ini juga berarti rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Petani, Jumlah yang Berusaha di Sektor Pertanian dan Jumlah Buruh Sektor Nonpertanian terhadap Ketimpangan Penguasaan Tanah di Provinsi Jambi Tahun 2004 dan Tahun 2014

Setelah melalui beberapa tahapan maka dalam penelitian ini diperoleh model regresi OLS yang memenuhi uji statistik dan uji asumsi klasik yaitu sebagai berikut:

$$Gini_Land = \beta_0 + \beta_1 Gini_Inc + \beta_2 Entrepreneur_Agrc + \beta_3 Labor_nonAgrc + \varepsilon$$

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik OLS Pada Model Regresi di Provinsi Jambi Tahun 2004 dan Tahun 2014

Asumsi	Jenis Uji	P-Value		Keterangan
		2004	2014	
Kenormalan	Shapiro-wilk W test	0,241	0,118	Terima H ₀ (Normal)
Heteroskedastisitas	Breusch-Pagan test	0,344		Terima H ₀ (Tidak ada)
	/Cook-Weiberg test	0,586		Heteroskedastisitas)
Multikolinearitas	Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai Vif diantara 1,46 - 10,34	1,11	1,7	Tidak ada Multikolinearitas

Uji kenormalan kedua model menunjukkan bahwa asumsi kenormalan terhadap residu menunjukkan distribusi yang normal. Begitupun dengan uji heterogenitas menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas nilai rata-rata VIF kedua model kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Regresi Model Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Jumlah yang berusaha di Sektor Pertanian, dan Jumlah Buruh Sektor non Pertanian terhadap Ketimpangan Penguasaan Tanah

Variabel	OLS_2004 Gini_land	OLS_2014 Gini_land
Gini_Inc	0,459 (2,54)**	0,543 (4,98)***
Entrepreneur_Agrc	-0,00003 (-0,24)	-0,00081 (-4,11)***
Labor_non_agrc	-0,0004 (-0,83)	0,0032 (6,65)***
Constant	0,275 (4,34)***	0,247 (6,36)***
Observations	69	127
Prob > F	0,071	0,000
R-Squared	0,10	0,4

Catatan: *** Signifikan level 1 persen; ** Signifikan level 5 persen,
* Signifikan level 10 persen

Sumber: Hasil Olah Data SPP 2004 dan SPP 2014

Tahun 2004

Persamaan ketimpangan pendapatan, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh non pertanian yang diduga berpengaruh terhadap ketimpangan penguasaan tanah dipaparkan sebagai berikut :

$$Gini_Land = 0,275 + 0,459 Gini_INC - 0,000026Entrepreneur_Agrc + 0,00045Labor_nonAgrc + \varepsilon$$

Berdasarkan perhitungan besarnya probabilitas F statistik sebesar 0,071 artinya dengan tingkat kepercayaan 99 persen secara bersama-sama ketimpangan pendapatan, jumlah yang berusaha di sektor pertanian, jumlah buruh sektor pertanian dan jumlah buruh non pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan penguasaan tanah atau dengan kata lain berdasarkan uji *overall F test* dapat disimpulkan bahwa model yang diperoleh tidak layak dipergunakan dalam analisis karena $F_{hit} > F_{tabel}$ ($0,071 > 0,05$) jadi tolak H_0 .

Tahun 2014

Ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh non pertanian memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan penguasaan tanah. Ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh non pertanian memiliki tingkat signifikansi 99 persen. Sementara itu berdasarkan perhitungan besarnya probabilitas F statistik sebesar 0,00 artinya dengan tingkat kepercayaan 99 persen secara bersama-sama ketimpangan pendapatan, jumlah yang berusaha di sektor pertanian, jumlah buruh sektor pertanian dan jumlah buruh non pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan penguasaan tanah atau dengan kata lain berdasarkan uji *overall F test* dapat disimpulkan bahwa model yang diperoleh layak dipergunakan dalam analisis. Selanjutnya dari hasil perhitungan nilai R^2 diperoleh nilai sebesar 39,58 persen. Nilai ini menjelaskan bahwa semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 39,58 persen dan sisanya sebesar 60,42 persen. Sementara itu persamaannya dapat dijelaskan berikut ini:

$$Gini_Land = 0,25 + 0,54 Gini_INC - 0,00082 Entrepreneur_Agrc + 0,0032 Labor_non_Agrc + \varepsilon$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan ketimpangan pendapatan memiliki koefisien regresi sebesar 0,54 dan menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini berarti jika ketimpangan pendapatan petani meningkat satu persen maka hal ini berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan penguasaan tanah sebesar 0,54. Menurut Prof. Gunnar Myrdal dalam Todaro (1993) salah satu penyebab ketimpangan penguasaan tanah adalah meningkatnya kekuatan pemilik modal yang bertindak sebagai rentenir. Kemudian Suhendar (1995) menyatakan Petani kaya lebih mampu memperbaiki nasibnya berdasarkan aset tanah dan modal yang dimiliki dibandingkan petani kecil. Perilaku petani kaya ini selain semakin memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan juga memperlebar ketimpangan penguasaan tanah.

Jumlah yang berusaha di sektor pertanian memiliki koefisien regresi sebesar 0,00082 dan hubungan yang negatif. Angka ini mengandung pengertian jika jumlah yang berusaha di sektor pertanian berkurang sebesar satu persen maka hal ini berpengaruh terhadap naiknya ketimpangan penguasaan tanah pertanian sebesar 0,00082. Hal yang menjadi penyebab berkurangnya petani yang berusaha di sektor pertanian salah satunya adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik pada sektor lain. Hal ini sesuai dengan ulasan Wiradi & White (2009) salah satu yang menjadi motivasi petani memasuki usaha di luar pertanian adalah mempertahankan hidup agar tetap hidup karena di sektor pertanian tidak mencukupi. Tidak jarang untuk memulai usaha di luar sektor pertanian ini para petani harus menjual tanah yang mereka miliki kepada petani lain yang memiliki modal lebih besar. Alasan lainnya penjualan tanah untuk usaha di luar sektor pertanian karena mereka menilai usaha di luar sektor pertanian tidak membutuhkan lahan yang luas. Ketika usaha mereka tidak menunjukkan hasil mereka kembali menjadi petani yang tidak memiliki tanah. Hal ini menyebabkan terakumulasinya tanah pada petani dengan modal yang besar jika kondisi ini terus berlanjut akan semakin memperlebar ketimpangan tanah.

Jumlah buruh di sektor nonpertanian memiliki koefisien regresi sebesar 0,0032 dan menunjukkan hubungan yang positif. Angka ini bermakna jika jumlah buruh di sektor pertanian meningkat satu persen maka hal ini berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan penguasaan tanah sebesar 0,0032. Seringkali petani yang berada di pedesaan melakukan urbanisasi dengan alasan untuk bekerja di sektor nonpertanian. Menurut Gunawan & Erwidodo (1992) kecenderungan untuk melakukan urbanisasi lebih besar terjadi pada petani pemilik lahan yang kecil dan tunakisma sedangkan pada petani dengan lahan yang luas kecenderungan melakukan urbanisasi dilakukan oleh kaum muda karena mereka beranggapan bahwa bekerja di sektor pertanian berkonotasi inferior sehingga di sektor pertanian hanya menyisakan kaum tua. Biaya untuk bekerja di sektor nonpertanian ini bagi petani kecil mereka peroleh dari hasil menggadaikan tanah atau justru menjualnya. Sementara itu bagi petani dengan penguasaan tanah yang luas karena faktor usia sehingga menyebabkan kurangnya kekuatan untuk berusaha, mereka menyewakan tanah mereka pada petani yang memiliki modal yang lebih besar. Fenomena ini menjadi salah satu penyebab terakumulasinya tanah pada petani yang kaya yang akhirnya memperparah tingkat ketimpangan tanah. Selanjutnya dijelaskan oleh Tambunan (2001) dampak positif dari pembangunan ekonomi nasional diantaranya adalah semakin berkembangnya sektor diluar pertanian (manufaktur, perdagangan, perbengkelan dan jasa lainnya) dan penerapan teknologi baru dan penggunaan input-input yang lebih baik di wilayah pedesaan. Dampak tersebut juga berimplikasi pada naiknya ketimpangan tanah di tingkat petani. Dengan beralihnya petani ke sektor di luar pertanian disertai pula perpindahan penguasaan tanah karena sektor tersebut tidak membutuhkan tanah dalam jumlah luas. Penggunaan teknologi dan input lain semakin mengurangi jumlah yang berusaha di sektor pertanian yang juga meningkatkan ketimpangan penguasaan tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Selama kurun waktu sepuluh tahun terdapat peningkatan jumlah kecamatan yang memiliki luas penguasaan tanah sebesar 2 Ha yaitu dari 25 kecamatan menjadi 47 kecamatan. Sementara itu untuk angka gini ratio ketimpangan penguasaan tanah, pada tahun 2004 umumnya ketimpangan penguasaan tanah hanya berada pada tingkat rendah tetapi tahun 2014 kondisi ini mengalami peningkatan menjadi tingkat ketimpangan sedang. Sedangkan kondisi pendapatan petani didominasi oleh perkebunan. Sementara itu angka gini ratio ketimpangan pendapatan pada tahun 2004 dan tahun 2014 berada tingkat keparahan rendah. Selanjutnya kondisi tingkat pendidikan petani pada umumnya hanya memiliki ijazah SD sederajat. Lebih lanjut tenaga kerja dari rumah tangga pertanian ini didominasi oleh laki-laki dan berada pada rentang usia terbanyak 40 tahun ke atas. Sementara itu untuk model regresi Provinsi Jambi tahun 2004 tidak bisa di analisis karena nilai dari uji F model lebih besar dari 0,05. Sementara itu untuk tahun 2014 diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh non pertanian terhadap ketimpangan penguasaan tanah dengan tingkat signifikan satu persen dan pengaruh variabel bebas terhadap ketimpangan penguasaan tanah tersebut adalah 39,58 persen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Proses ketimpangan penguasaan tanah berlangsung secara perlahan dan akan semakin parah dari tahun ke tahun. Kondisi ini perlu diatasi dengan menerapkan kebijakan pembangunan yang tepat yang melibatkan masyarakat khususnya petani atau konsep *bottom-up planning* sehingga dalam pemanfaatan tanah dapat dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan peruntukkan tanah dan perlu dilakukan program peningkatan pengetahuan petani dan minat

generasi muda terhadap pertanian. Sebagai tindak lanjut perlu diadakan penelitian lanjutan tentang variabel lain di luar model yang mempengaruhi ketimpangan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2014. *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian Tahun 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Barlowe, R. (1986). *Land Resources Economics : The Economics of Real estates*. Washington: Prentice Hall.
- Dumayri. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta
- Jonida Bou Dib, Vijesh V. Krishna, Zulkifli Alamsyah & Matin Qaim. 2018. *Land Use Change and Livelihoods of Non-farm Households: The ole of Income from Employment in Oil Palm and Rubber in Rural Indonesia*. Elsevier
- Karimi, Syafruddin. 2014. *Makalah Demokrasi: Sistem Pasar dan Redistribusi Kapasitas Produktif*. Unand: Padang
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomi Pembangunan*. Jakarta, Erlangga.
- Machmud Amir. 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Erlangga. Jakarta
- M. Gunawan & Erwidodo. 1992. *Studi Dinamika Keterkaitan Desa Kota*. Bogor. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Monograph No.4.
- Okwan Himpuni. 2014. Tesis: *Perubahan Srtruktur Tenaga kerja Pertanian ke Non Pertanian di Provinsi Lampung*. IPB. Bogor
- Soekartawi, Dilon, J., Hardaker, J., & Soeharjo, A. (1986). *Ilmu Usahatani dan penelitian untuk Perkembangan Petani Kecil*. Bogor: Fakultas Pertanian IPB.
- Suhendar, E. (1995). *Ketimpangan Penguasaan Tanah di Jawa Barat*. Jakarta: Yayasan Akatiga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Tulus Tambunan T. 2001. *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Wiradi, G., & white, B. (2009). *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif*. Bogor: Brigthen Institute.
- Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
- Xie, Hualin & Hua Lu. 2017. *Impact of land fragmentation and non-agricultural labor supply on circulation of agricultural land management rights*. Elsevier, 1